

Kab. Bogor Bikin 50 Huntera untuk Korban Pergeseran Tanah Sukamakmur

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyediakan 50 huntera untuk sementara (huntera) untuk korban pergeseran tanah di Sukamakmur. Bencana alam itu terjadi pada 11 November 2021.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor akan membuat 50 huntera untuk 50 keluarga. Hal itu disampaikan Ajat setelah meninjau lahan huntera di Sukamakmur, Minggu kemarin.

"Lokasi huntera bersebelahan dengan SDN Gunungbatu, yang sekarang dipakai jadi tempat pengungsian," kata Ajat di Sukamakmur.

Untuk membuat huntera bagi korban pergeseran tanah itu, Dinas Perumahan akan melaksanakan perataan tanah

di lahan seluas 6.000 meter persegi milik Kabupaten Bogor. Lahan aset pemda itu berada di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur. "Lokasi huntera relatif aman dari pergerakan tanah," ujarnya.

Menurut Ajat, pembangunan huntera korban pergeseran tanah Sukamakmur sangat mendesak. Sebab bangunan sekolah SDN Gunungbatu, yang sekarang menjadi tempat pengungsian akan dipakai untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat 57 keluarga, yang terdiri dari 198 jiwa, terdampak bencana pergeseran tanah di Sukamakmur. Akibat pergeseran tanah tersebut, empat rumah rusak cukup parah. "Posisi 53 rumah lain terancam," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. • **gio**

Dukung Kota Layak Anak, Pengusaha Bentuk APSAI Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota Bandung menggandeng pengusaha untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan membentuk APSAI.

Pasalnya, Pemkot Bandung sangat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Hanya dengan begitu, Kota Layak Anak Kota Bandung bisa diwujudkan.

Ajakan kolaborasi menjadikan Bandung Kota Layak Anak tersebut disambut positif para pengusaha dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung, Senin (29/11).

Salah seorang pengusaha, Rustam Hutabarat mengaku mendukung program Pemkot Bandung terkait Kota Layak Anak. Sehingga ia bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Bandung siap untuk mengumpulkan para pengusaha untuk membentuk kepengurusan APSAI Kota Bandung.

"Kami dari Kadin mendukung. Karena Kadin sendiri tidak hanya menggaungkan tentang anak, tetapi lansia, orangtua, ayah, dan ibu," kata Rustam yang juga Ketua 1 Bidang Organisasi Kadin Kota Bandung.

Menurutnya, Kadin Kota Bandung juga sebelumnya telah memiliki program pada permasalahan Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak. Kadin mengajak para pengusaha dan stakeholder lain untuk sama-sama peduli dengan hal tersebut.

"Karena, bagaimana pun juga anak-anak ini, 5-10 tahun mendatang menjadi pemimpin, generasi penerus. Ini harus dibina, tidak hanya oleh Pemerintah saja, Pengusaha juga harus membantu, terlebih bonus demografi juga sudah mulai terlihat," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan, Kota Layak Anak harus memiliki sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Tentunya dalam kebijakan baik kebijakan program dan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu kita komitmen yang terintegrasi menjadi kata kuncinya. Ini merupakan bagian dari upaya-upaya optimal kita di dalam menghadirkan program-program yang terintegrasi satu sama lain, karena Pemerintah terbatas, Dinas juga terbatas SDM-nya, APBD juga terbatas, banyak sekali kekurangan keterbatasan kami sebagai pemerintah di daerah," kata Oded.

Oleh karenanya Oded mengungkapkan kolaborasi integrasi program itu suatu keniscayaan, termasuk menghadirkan kota layak anak.

Sedangkan Kepala DP3A Kota Bandung, Rita Verita menyampaikan, Kota Bandung merupakan kota yang memiliki komitmen di dalam mewujudkan kota layak anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, serta melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

"Kota Bandung yang memiliki visi unggul nyaman sejahtera dan agamis, siap untuk mengimplementasikan kebijakan kota layak anak sebagai salah satu program untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di dalam merealisasikan komitmen, harapan, dan tujuan Kota Layak Anak sesuai dengan empat pilar," kata Rita. • **pur**

IDN/ANTARA



BANJIR KEMBALI RENDAM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Warga berjalan melintasi banjir yang merendam pertokoan di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Senin (29/11). Hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu (28/11) mengakibatkan pusat perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali terendam banjir dari ketinggian 30 cm hingga dua meter.

Progres Vaksinasi Covid-19 di Beberapa Kecamatan Kab. Bogor Masih Rendah

CIBINONG (IM)- Kecamatan Nanggung, Rumpin dan kecamatan perbatasan lainnya di Kabupaten Bogor masih tercatat rendah terkait progres vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor termasuk Polres Bogor dan Kodim 0621 melakukan berbagai upaya untuk melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

Ketua Harian Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan pihaknya akan melakukan segala cara.

"Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor termasuk Polres Bogor, Kodim 0621, relawan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Darurat Wisna Atlet DKI dan Kodam III Siliwangi Jakarta melakukan 'penyerbuan' vaksin, menyisir warga yang belum divaksin," ungkap Burhanudin, kemarin.

Sekda Kabupaten Bogor ini menerangkan bahwa saat ini, berkat berbagai upaya seperti vaksinasi door to door, vaksinasi di malam hari dan sebagainya. Progres vaksinasi Covid-19 di Bumi Tegar Beriman sudah mencapai 72 persen.

"Progres vaksinasi di 40 kecamatan berbeda-beda, namun secara total progres vaksinasi Covid-19 itu sudah 72 persen,

dan dengan progres para lanjut usia (Lansia) sebesar 50 persen," terangnya.

Demi mempercepat vaksinasi Covid-19 di kecamatan, desa atau kampung terpecil yang masih di bawah 60 persen progressnya, Panglima Kodam III Siliwangi, Mayjend TNI Agus Subiyanto siap melakukan berbagai upaya.

"Kodam III Siliwangi, Kodim 0621 dan Koramil siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 di kecamatan, desa atau kampung terpecil yang masih dibawah 60 persen progressnya, kami siap berjalan kaki untuk menuju kampung atau pemukiman warga," ucap Mayjend TNI Agus Subiyanto.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi menambahkan bahwa stock vaksin Covid-19 saat ini jumlahnya mencukupi, warga yang belum diberikan dosis kedua vaksin Covid-19 bisa meraihnya di Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan masyarakat lainnya.

"Saat ini, kami juga mengesampingkan percepatan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua, selain dengan membuat sentra vaksinasi, kami juga melayani vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Puskesmas-Puskesmas dengan tujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat," tambah Agus. • **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI

Foto udara kawasan ladang ilegal di dalam kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), kaki Gunung Kerinci, Jambi, Senin (29/11). Penebangan kayu dan pembukaan lahan ilegal dalam kawasan lindung taman nasional setempat masih terus terjadi dan bertambah parah dalam beberapa tahun terakhir.

911 Ribu Hektare Lahan di Jawa Barat Kategori Kritis

Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Epi Kustiawan mengatakan lahan kritis itu berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi dengan luas sekitar 200 ribu hektare.

BANDUNG BARAT (IM)- Dinas Kehutanan Jabar menyebut ada sekitar 911 ribu hektare lahan kritis di Jawa Barat. Lahan kritis di Jabar sebagian besar berada di luar kawasan hutan dengan luas hampir 711 ribu hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Epi Kustiawan mengatakan ada juga lahan kritis yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi dengan luas sekitar 200 ribu hektare.

"Terluasnya ada di luar kawasan hutan artinya yang dimiliki oleh warga dengan luas kurang lebih ada 711 ribu hektare lebih. Lalu di dalam kawasan hutan mencapai 200 ribu hektare. Lahan kritis yang dominan itu berada di daerah selatan seperti Sukabumi, Cianjur, itu luas lahan kritisnya," ujar Epi, Senin (29/11).

Secara lebih rinci lagi, dia menjelaskan, Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk Kabupaten Bandung Barat juga ada sekitar 19 ribu hektare lahan kritis. Sementara di KBU termasuk di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum lahan kritisnya sekitar 77 ribu hektare.

"Kalau di KBU itu total ada 77 ribu hektare lahan kritis. Untuk yang masuk di wilayah KBB

luas kurang lebih ada 711 ribu hektare lebih. Lalu di dalam kawasan hutan mencapai 200 ribu hektare. Lahan kritis yang dominan itu berada di daerah selatan seperti Sukabumi, Cianjur, itu luas lahan kritisnya," ujar Epi, Senin (29/11).

Secara lebih rinci lagi, dia menjelaskan, Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk Kabupaten Bandung Barat juga ada sekitar 19 ribu hektare lahan kritis. Sementara di KBU termasuk di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum lahan kritisnya sekitar 77 ribu hektare.

"Kalau di KBU itu total ada 77 ribu hektare lahan kritis. Untuk yang masuk di wilayah KBB

Biskita Transpakuan Buka Koridor 6

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka koridor 6 Parung Banteng-Air Mancur Biskita Transpakuan. Biskita merupakan bagian dari program buy the service (BTS).

Hingga akhir Desember 2021, Biskita masih gratis dan mempunyai 20 titik pemberhentian. Titik pemberhentian koridor 6 antara lain Parung Banteng 2, Baranangsiang

Indah 2, Simpang Bogor Baru, Bratasena, Taman Corat Coret 1, Jambu Dua 1, SMPN 8, BPJS, Dinkes, dan Air Mancur 1.

Arah sebaliknya, dari Air Mancur 2, GOR Pajajaran, Gedung DPRD, SMPN 5, Jambu Dua 2, Villa Citra Bantarjati, Taman Corat Coret 2, Simpang Cimahpar, Baranangsiang Indah 1, Griya Bogor Raya, dan Parung Banteng.

Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo men-

gatakan, hingga akhir 2021, tarif layanan bus ini masih gratis.

"Cukup dengan menempelkan kartu uang elektronik nontunai di pintu masuk sebelum menaiki bus," katanya, Senin (29/11).

Di sisi lain, Eko menjelaskan, dengan hadirnya Biskita Transpakuan, pihaknya sedang merampungkan konsep rerouting angkot untuk diusulkan menjadi feeder atau pengum-

pan bus BTS.

"Sekarang kita sedang lakukan rerouting, minggu besok tahap akhir. Dari evaluasi rerouting trayek itu akan diusulakan jadi feeder BTS. Pertengahan Desember kita usulkan ini ke BPTJ. Ini jadi kesepakatan ini untuk menata transportasi. Feeder ini pengumpan ke Biskita. Jumlah feeder atau angkot feeder ini menyesuaikan koridor Biskita," ujar Eko.

Ia juga menambahkan, proses rekrutmen pengemudi angkot menjadi pengemudi Biskita masih terus dilakukan.

"Namun ada kendala teknis yaitu di SIM. Prosesnya harus, SIM A, SIM B1 umum dan B1 biasa. Ini saya sampaikan ke teman-teman Organda dan sopir angkot untuk mengikuti proses karena mereka juga akan diterima," pungkasnya. • **gio**

Ibu Kota Bogor akan Dipindah

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor akan membangun pusat pemerintahan yang baru di wilayah Katulampa. Lahan yang digunakan adalah hibah dari pemerintah pusat eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdur Rachim mengatakan, pusat pemerintahan yang baru itu akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektare. Ia mengungkapkan alasan kenapa pusat pemerintahan akhirnya akan dipindah ke lokasi tersebut.

Menurut Dedie, selama dua tahun terakhir, pihaknya mencari solusi bagaimana agar beban lalu lintas bisa tersebar di wilayah Kota Bogor. "Salah satunya adalah memindahkan pusat pemerintahan atau kantor Wali Kota dan kedinasan ke suatu tempat," ujar dia kemarin.

Sehingga, kata Dedie, tak semua pengelolaan administrasi tertumpu di tengah kota. "Saat ini dalam satu arah ada berapa kantor, dan itu menjadi salah satu beban padatnya lalu lintas di kita," ujar dia.

Dedie mengatakan, saat ini di tengah Kota Bogor berdiri beragam jenis perkantoran. Mulai dari pusat pemerintah kota, instansi perwakilan Jawa Barat, gedung pendidikan, pasar, hingga Istana Bogor.

Karena itu pemerintah kota memikirkan salah satu solusinya adalah bisa memberikan layanan terpadu ke masyarakat dalam satu kompleks pemerintahan.

"Awalnya itu dulu, terus kami mengajukan. Nah kita dapat lahan bekas BPPN atau eks BLBI seluas 6 hektare di Katulampa. Itu yang kami rencanakan untuk pusat perkantoran Pemkot Bogor baru," ujar dia.

Tahun depan, kata De-

die, pihaknya akan mulai menggambar desain dan rancangan Ibu Kota Bogor yang baru itu. Setelah semua selesai, kata dia, baru anggaran pembangunannya diajukan ke DPRD Kota Bogor.

Selain lahan seluas 6 hektare tadi, Pemkot Bogor juga mendapat hibah lahan 3,2 hektare di wilayah Empang dari pemerintah pusat. Lahan itu rencananya akan dibuat menjadi tiga fungsi.

Pertama, untuk pembangunan Stoplat atau stasiun kecil penumpang kereta double track. Kedua, untuk pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup Ketiga, untuk pembangunan Kantor Departemen Agama Kota Bogor.

"Untuk Kandepag itu kami hibahkan lagi sekitar 2.500 atau tiga ribu meter, nanti rencana, DED (detailed engineering design), anggaran dan lainnya itu dibiayai oleh pusat. Kalau untuk kantor DLH, itu pembiayaannya dari kita. Untuk stoplat, kita akan kerjasama dengan PT KAI," ucap Dedie.

Dedie mengatakan karena berbagai kebutuhan itu akhirnya pemerintah pusat memberi hibah lahan ke Pemkot Bogor.

Dedie mengatakan selama ini kantor pemerintahan kota Bogor berada di dalam gang sempit, di perumahan dan lainnya yang secara akses mempengaruhi pelayanan kepada warga masyarakat.

"Nah kondisi kantor kita seperti itu kan tidak representatif buat masyarakat. Untuk itu, ke depan kami akan fokuskan dengan sistem terpadu jadi masyarakat juga mudah saat mengurus kebutuhannya. Jadi nanti mau ke UMKM, ke Perindag, Capil dan lain-lain itu cukup di satu tempat dan mudah dijangkau baik secara waktu atau pun aksesnya," ucap mantan petinggi KPK ini. • **gio**

